

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA KUMA SELATAN KECAMATAN  
ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**RISKI MAUNDE  
JOHNNY POSUMAH  
HELLY F KOLON DAM**

**Abstract**

Pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit korona virus 2019 (bahasa Inggris: *corona virus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID -19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya efektivitas kebijakan, upaya pemberdayaan masyarakat, program dana desa dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka yang menjadi fokus dalam dalam penanggulangan Covid-19 dan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut teori Edward III (Subarsono, 2006:90) dapat diukur melalui 4 dimensi yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Partisipasi, Masyarakat, Penanggulangan, Covid-19, dan Desa kuma Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Talaud**

**PENDAHULUAN**

Pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit korona virus 2019 (bahasa Inggris: *corona virus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan

lebih dari 781,109 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID -19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat

belas hari.

Gejala umum diantaranya seperti demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Belum ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Dalam menanggapi fenomena yang terjadi akibat dari Covid-19, pemerintah selalu hadir untuk rakyatnya dengan memberikan berbagai solusi baik itu berupa bantuan materi atau non materi dengan hadirnya peraturan pemerintah dalam mengatasi bagi masyarakat yang memiliki kredit UKM ataupun Leasing dengan diperlakukannya relaksasi sehingga ada kelonggaran demi terwujudnya perekonomian yang stabil dikalangan masyarakat menengah kebawah, bantuan berupa subsidi listrik juga diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena wabah virus corona.

Virus Covid-19 yang sudah memasuki negara Indonesia terlebih Provinsi Sulawesi Utara mendapat perhatian khusus dari pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan beberapa langkah antisipasi dan pencegahan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah *social distancing* atau jaga jarak, serta anjuran untuk keluar rumah memakai masker. Namun, anjuran-anjuran tersebut masih sulit untuk dilakukan para masyarakat Kepulauan Talaud. Masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan dan himbauan pemerintah. Masyarakat tidak merespon dengan baik bahkan melanggar anjuran dan kebijakan yang telah diberikan, karena mereka tidak menganggap ini

merupakan kondisi yang penting bagi kehidupan. Masyarakat Kepulauan Talaud kesulitan menjalankan *social distancing* karena kebiasaan dalam kebersamaan, kerja sama, solidaritas, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. Bagi masyarakat awam, mereka beranggapan *social distancing* hanya sebatas menjaga jarak, tanpa tau apa manfaat dan tujuan kebijakan tersebut. Inilah yang menjadi ancaman bagi masyarakat lainnya.

Upaya penanganan penyebaran Virus Covid-19 ini tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan jika respon dan partisipasi masyarakat masih kurang. Dengan demikian kebijakan tentang *social distancing* harus lebih ditekankan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud harus perlu mensosialisasikan kebijakan *social distancing* secara terus-menerus agar masyarakat Talaud memahami secara benar tentang kegunaan kebijakan ini bagi kesehatan bersama masyarakat sebagai hasil dari ikatan relasi sosial yang sangat kuat. Dengan demikian, penanggulangan wabah Covid-19 memerlukan pendekatan kultural, dan karenanya peranan para tokoh dan pihak-pihak yang memegang kekuatan kultural dalam masyarakat sangat vital. Perlu melibatkan pemerintah desa seperti Kepala Desa, serta pihak berwenang seperti jajaran Kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan terhadap masyarakatnya. Tidak ada pilihan lain, mengatasi wabah Covid-19 memerlukan sinergi semua pihak, kesadaran dan pengorbanan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pelaksanaan (Implementasi)**

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan - kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti. Berikut disampaikan beberapa pengertian

implementasi menurut para ahli. Pengertian pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra. Dkk (2009:256) adalah : "Aktivitas atau usaha- usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan".

Adapun definisi Pelaksanaan (Implementasi) menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2006; 139), yaitu : pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Hont (Budi Winarno, 2002; 102) membatasi pelaksanaan (implementasi) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diartikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan (Implementasi) kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006:90), implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- Sumberdaya (*resource*), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- Sikap birokrasi dan pelaksana (*disposisi*) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- Faktor Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III 1980: 125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-type, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak

fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard operating Procedure (SOP) dan fragmentasi

### **Konsep Kebijakan**

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005), bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara, menurut Elau dan Prewifi dalam buku Edi Suharto, kebijakan adalah Sebuah ketepatan yang berlaku yang didirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya, maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Dalam bukunya Said Zainal Abiding (2002) menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen yaitu tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

- Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
- Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis,

asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.

- Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat pencapaian kehendak. Dilain sisi ada pendapat menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

### **Konsep Dimensi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn and William N. (1981). dimensi implementasi kebijakan publik berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan publik, yang secara teoritis terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- Tahap-tahap kebijakan publik yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting) formulasi kebijakan (*policy implementation*), adopsi kebijakan. implementasi kebijakan (*Policy implementation*) hingga penilaian kebijakan (*Policy assesment*).
- Analisis kebijakan yaitu pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk di implementasikan
- Implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam

hal ini bagaimana administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan hingga menerapkan kebijakan yang telah melalui seleksi.

- Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang di peroleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program, mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar kebijakan atau politik.

Menurut Dunn and William N. (1981) Implementasi kebijakan pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) model yaitu :

- Model Perspektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan "sebelum" suatu kebijakan di terapkan. Model ini dapat disebut dengan model produktif. karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan
- Model Retrospektif, yaitu analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat- akibat kebijakan "setelah" suatu kebijakan diimplementasikan Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang dan atau telah diterapkan.
- Model Integratif, yaitu perpaduan antara model prospektif dan retrospektif Model ini kerap kali disebut model komprehensif atau holistik, hal ini dikarenakan analisis ini dilatalkan oleh konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin sebelum atau sesudah dilaksanakan atau dioperasikan

Ada beberapa teori menurut para ahli, untuk dapat digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik yaitu :

- Teori Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983)  
Menurut Subarsono, (2010:101), konsep teori G. Shabbir cheema dan Dennis A. Rondinelli terdiri atas 4 (empat) faktor atau variabel, untuk mengukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan publik yaitu :
  - Kondisi Lingkungan
  - Hubungan antar organisasi
  - Sumber daya organisasi untuk implementasi program
  - Karakteristik atau kemampuan agen pelaksana
- Teori menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  
Menurut Subarsono. (2010:94) konsep teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, terdiri atas 3 (tiga) faktor atau variabel mengukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan publik yaitu :
  - Karakteristik Masalah (*tractability of problems*)
  - Karakteristik Kebijakan (*ability of statue of implementation*)
  - Variabel Lingkungan (*non statutory varbles affecting implementation*)

### **Konsep Partisipasi**

- Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh kaena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini.
  - Chandra (2003:5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah- masalah

pembangunan berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor structural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kegiatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

- Selanjutnya Norman (dalam Kaho, 2005:126), berpendapat bahwa "partisipasi merupakan mental dan emosional seseorang yang mendorong mereka untuk terlibat dalam suatu kelompok yang mana mereka dituntut untuk berkontribusi terhadap kelompok serta bertanggung jawab dan berbagi untuk tercapai tujuan yang ada. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa partisipasi merupakan sikap mental dan emosional yang mendorong untuk dapat terlibat dalam suatu kelompok, dimana dalam kelompok itu dituntut untuk berkontribusi terhadap kelompok serta bertanggung jawab dan berbagi untuk tercapai tujuan yang ada.

- Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) partisipasi lebih pada alat sehingga di maknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.

- Selanjutnya Koetjaraningrat (2003), berpendapat bahwa partisipasi berarti memberikan sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, di mana ditekankan bahwa pembangunan adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat.

### **Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Covid – 19**

Corona (covid-19) menjadi virus yang menakutkan, padahal ia hanya sebuah virus seperti virus-virus lainnya. Tingkat kematian dari virus ini juga rendah, tidak setinggi virus-virus lainnya. Tingkat kematian virus SARS (2002-2003) adalah 9,6%, virus

MERS (2012-2019) adalah 34,4%, dan virus Ebola (2014-2016) sebesar 25% sampai 90%. Sementara tingkat kematian virus corona secara global sekitar 11% sampai akhir Maret 2020. Namun demikian ini baru angka sementara, karena kemungkinan untuk penyebaran virus corona ini masih akan terus berlangsung dalam beberapa bulan ke depan (prediksi dari para ahli).

- Di tingkat pencegahan, ada beberapa pendekatan yang dilakukan secara global, yakni menerapkan pendekatan *social distancing, stay at home*, cuci tangan dengan sabun (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS), dan memakai masker jika keluar rumah terutama bagi yang kurang sehat. Terlihat bahwa semua pendekatan dalam pencegahan covid-19 membutuhkan partisipasi individu dan masyarakat (publik). Masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi secara ketat dalam menerapkan semua pendekatan pencegahan covid-19 tersebut. Lalu, bagaimana hubungan keberhasilan pencegahan covid-19 dengan tingkat partisipasi publik dalam *social distancing, stay at home*, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker jika keluar rumah?

- Di tingkat pencegahan, ada beberapa pendekatan yang dilakukan secara global, yakni menerapkan pendekatan *social distancing, stay at home*, cuci tangan dengan sabun (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS), dan memakai masker jika keluar rumah terutama bagi yang kurang sehat. Terlihat bahwa semua pendekatan dalam pencegahan covid-19 membutuhkan partisipasi individu dan masyarakat (publik). Masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi secara ketat dalam menerapkan semua pendekatan pencegahan covid-19 tersebut. Lalu, bagaimana hubungan keberhasilan pencegahan covid-19 dengan tingkat partisipasi publik dalam *social distancing, stay at home*, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker jika keluar rumah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya efektivitas kebijakan, upaya pemberdayaan masyarakat, program dana desa dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh implementasi atau para pelaksana kebijakan.

Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor – faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman maka akan dibahas menggunakan model – model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (2002:125) yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 sudah terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan sangat rendah

atau kurang hal ini dapat dilihat dari ketidak patuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

- Kualitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa Kuma belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan penanggulangan covid – 19 akan tetapi kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu pemerintah Desa Kuma dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa sangat kurang.
- Disposisi (komitmen konsistensi) aparat pemerintah Desa Kuma pemerintah kecamatan Essang Selatan dan Pemerintah Kabupaten dalam program penanggulangan Covid-19 cukup baik tapi komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan Covid-19 sangat kurang.
- Struktur birokrasi melalui mekanisme prosedur dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid – 19 berjalan dengan baik tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program karena semua dilakukan secara terkoordinasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Agar masyarakat patuh terhadap pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 maka kepada pemerinta desa disarankan untuk melakukan pendekatan serta mengedukasi masyarakat agar dengan sukarela dapat berpartisipasi melalui keikutsertaan mereka dalam mematuhi protokol kesehatan.
- Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar pemerintah atau organisasi lainnya serta peningkatan kualitas dan kuantitas guna mendukung program penanggulangan Covid-19.

- Diharapkan pemerintah Desa Kuma lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 terutama dapat mengarahkan masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan.
- Diperlukan komitmen serta konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan Covid-19 agar apa yang sudah diprogramkan dapat dilaksanakan.

Parwito. 2001. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.

Said, Zaenal Abidin. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancar Jiwa.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung

Tangkilisan. 2003. *The Policy-Making Process*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Wahab, Solicin Abdul. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Model Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta

Westra, Pariata. DKK. 2000. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Wuryan, Syaifullah. (2008) *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Leo. 2006. *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.

A. G. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Mulyana, Dedey. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remanja Rosdakarya

Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 2002. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill

Nugroho Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Putra, Fadillah 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.